

MEWUJUDKAN LINGKUNGAN SEKOLAH RAMAH ANAK: STUDI IMPLEMENTASI DI SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA

REALIZING A CHILD-FRIENDLY SCHOOL ENVIRONMENT: AN IMPLEMENTATION STUDY AT SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA

Oleh: Anna Raisha Yasmine, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
annaraisha.2021@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta; 2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta telah berjalan dengan baik berdasarkan empat aspek menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 2) Faktor pendukung utama dari implementasi Program SRA di SMP Negeri 15 Yogyakarta antara lain adalah komitmen kuat dari kepala sekolah dan guru, adanya pelatihan berkelanjutan, fasilitas yang inklusif, serta sistem pengambilan keputusan yang partisipatif. Faktor penghambat mencakup ketimpangan dalam pemahaman siswa terhadap program, kurangnya intensitas penyampaian informasi, ketidakseimbangan kualitas fasilitas antar kelas, serta kurang optimalnya pelibatan orang tua dalam evaluasi program.

Kata kunci: implementasi, Program Sekolah Ramah Anak (SRA), SMP Negeri 15 Yogyakarta

Abstract

This research aims to 1) Describe the implementation of the Child Friendly School (SRA) program at SMP Negeri 15 Yogyakarta; 2) To identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Child-Friendly School (SRA) program at SMP Negeri 15 Yogyakarta. This research uses a descriptive qualitative approach with data analysis techniques used include data collection through observation, interviews, and documentation, which are then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana analysis model. The data validity test used source triangulation and technique triangulation techniques. Of The Child Friendly School Program (SRA) at SMP Negeri 15 Yogyakarta has been running well based on four aspects according to Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. 2) The main supporting factors of the implementation of the S6RA Program at SMP Negeri 15 Yogyakarta include a strong commitment from the principal and teachers, continuous training, inclusive facilities, and a participatory decision-making system. The inhibiting factors include inequality in students' understanding of the program, lack of intensity of information delivery, imbalance in the quality of facilities between classes, and less than optimal involvement of parents in program evaluation.

Keywords: implementation, Child Friendly School Program (SRA), SMP Negeri 15 Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan sekolah merupakan aspek krusial dalam menciptakan ekosistem belajar yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menggagas Program Sekolah Ramah Anak (SRA), yang bertujuan membentuk satuan pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak hidup dan tumbuh kembang, serta pemberian ruang partisipasi kepada anak dalam aktivitas sekolah. Pelaksanaan program ini di berbagai sekolah menunjukkan beragam dinamika, yang bergantung pada kesiapan sumber daya, komitmen stakeholder, serta pola kerja birokrasi yang berlaku. Penelitian terbaru menyatakan bahwa efektivitas implementasi SRA sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, sikap dan komitmen dari pihak sekolah, serta dukungan struktural yang memadai (Sale et al., 2025). (Setiadi et al., 2023) meneliti peran guru kelas dan orang tua dalam upaya mencegah dan mengatasi perundungan, sebagai bagian dari implementasi sekolah ramah anak. Temuan menekankan pentingnya kolaborasi antara guru dengan

orang tua dalam lingkungan belajar yang aman dan suportif.

Kendati demikian, implementasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) di berbagai sekolah masih menghadapi berbagai tantangan di antaranya keterbatasan pelatihan bagi pendidik, rendahnya keterlibatan orang tua, dan lemahnya pengawasan serta tindak antikekerasan terhadap bentuk kekerasan verbal maupun fisik. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan program di tingkat sekolah serta sejauh mana nilai-nilai SRA telah menjadi bagian dari budaya institusional sekolah. (Azizah et al., 2024) dalam studi mereka menyebutkan bahwa di salah satu SM, pelaksanaan SRA masih kurang optimal karena belum ada pembaruan berkala program, hanya dikelola oleh aktor internal sekolah tanpa memperluas keterlibatan orang tua, sehingga kekerasan dalam lingkungan sekolah, baik verbal maupun fisik masih terjadi dengan variasi pelaku dan korban.

Selain untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, kajian terhadap implementasi Program Sekolah Ramah Anak juga bertujuan untuk menggali praktik-praktik baik (*best practices*) yang telah berhasil diterapkan oleh sekolah-sekolah tertentu sebagai model

percontohan. Pengalaman empiris dari sekolah-sekolah yang berhasil melaksanakan program Sekolah Ramah Anak (SRA) secara optimal dapat dijadikan tolok ukur dalam merancang strategi penguatan kebijakan di level lokal maupun nasional. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen kuat pimpinan, pelibatan berbagai pihak, serta desain strategi yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik sebagai landasan kebijakan efektif (Sukmawati & Tarmizi, 2022). Lebih dari itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dapat memunculkan inovasi kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan setiap anak. Pendekatan inovatif seperti pengembangan kurikulum adaptif, penerapan model kepemimpinan partisipatif, serta strategi pembelajaran inklusif bertujuan membentuk budaya sekolah yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan siswa secara holistik. (Syafi'i & Rosyidah, 2022) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum adaptif di sekolah inklusif dirancang untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan peserta didik, dan membantu sekolah menjadi lebih responsif terhadap keragaman siswa.

Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta terpenuhinya hak-hak anak memungkinkan akan menurunkan kualitas hidup anak sehingga nantinya dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh (Melinda et al., 2021) lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan anak, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan keterlibatan siswa di sekolah. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di segala lingkungan tumbuh kembang anak, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

Hal tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa satuan pendidikan merupakan lembaga yang menjadi pijakan dalam penguatan pendidikan karakter melalui program sekolah yang diberlakukan. Upaya tersebut merupakan cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam membentuk karakter anak. Diskriminasi anak semakin muncul di kehidupan sosial masyarakat. Sangat penting untuk melindungi hak-hak anak karena banyaknya kasus asusila, kekerasan, dan perundungan pada anak. Karena anak-anak sering menjadi pelampiasan kekerasan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Ironisnya, seorang anak sering

dianggap sebagai replika orang dewasa. Orang-orang di sekitarnya sering mengabaikan kebutuhan anak untuk lingkungan yang aman dan nyaman secara fisik dan mental, serta ekspresi cinta kasih dan apresiasi diri mereka terhadap anak.

Berdasarkan klaster KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Pengawasan kasus dilakukan di 78 wilayah mencakup klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Isu terbanyak yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus), anak korban kejahatan seksual (296 kasus), anak dalam pemenuhan pendidikan, penggunaan waktu luang, budaya, dan agama (241 kasus), anak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi dan *cyber crime* (40 kasus).

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, anak-anak seringkali mendapat perlakuan buruk secara verbal dan fisik. Kekerasan pada anak adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan tindakan-tindakan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara yang melanggar hukum. Anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun yang mendapat gangguan dari orang tua atau pengasuhnya dan dapat mengalami gangguan fisik, mental atau perkembangan disebut pelanggaran anak. Perlindungan hak-hak anak diperlukan karena banyaknya kasus kekerasan dan asusila terhadap anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah telah menetapkan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun di wilayah Kota Yogyakarta memiliki tingkat literasi dan kualitas pendidikan yang tinggi dan rata-rata lama sekolah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Selain itu, fenomena klitih yang merupakan tindakan kekerasan remaja juga mempengaruhi lingkungan belajar dan menciptakan ketidaknyamanan di kalangan siswa. Permasalahan pendidikan di Yogyakarta, khususnya di sekolah-sekolah semakin kompleks dengan meningkatnya kasus kekerasan remaja, termasuk *bullying*.

Bullying di kalangan siswa baik di tingkat SMP maupun SMA telah menjadi isu yang mengkhawatirkan, dengan banyaknya laporan mengenai kekerasan fisik, verbal, dan siber yang terjadi di lingkungan sekolah. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional korban, tetapi juga mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan suasana sekolah yang tidak aman. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan karakter, minimnya pengawasan dari pihak sekolah, dan budaya permisif di kalangan remaja berkontribusi terhadap tingginya angka *bullying*. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa.

Berdasarkan pernyataan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, ratusan kasus kekerasan terjadi selama 2024, dan perempuan masih menjadi korban terbanyak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas mengungkapkan hal itu. Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (Siga), tercatat ada 203 perempuan yang menjadi korban kekerasan dan 29 kasus yang

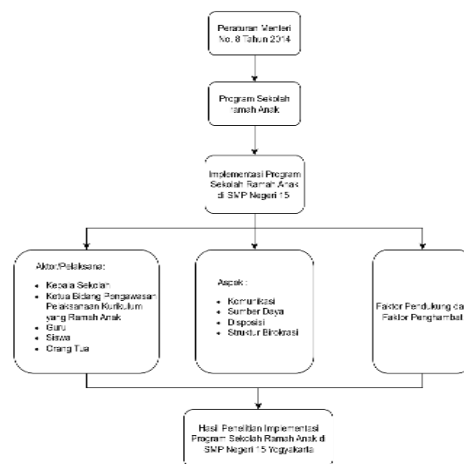
melibatkan laki-laki. “Sampai dengan saat ini, total 232 di tahun 2024, kemudian (korban) perempuannya 203”. Ada banyak alasan mengapa kasus kekerasan terjadi, menurut Retnaningtyas. Faktor yang paling sering disebut sebagai penyebab yaitu masalah ekonomi.

Berdasarkan data dan permasalahan terkait kasus kekerasan anak tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Sekolah Ramah Anak merupakan suatu satuan pendidikan yang bersifat aman, peduli, bersih, dan mampu menjamin dalam memenuhi dan menghargai hak-hak pada peserta didik dari kekerasan atau diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan. Adapun dasar dalam pengembangan sekolah ramah anak terdapat pada Pasal 4 UU No.23/2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas untuk hidup berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan kekerasan dan diskriminasi.

Sekolah Ramah Anak (SRA) hanya dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Keluarga dan lingkungan sosial merupakan pusat pendidikan pertama yang dekat dengan anak. Ketika lingkungan di sekitar sekolah memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan, anak-anak dapat terbantu dalam proses eksplorasi dan pencarian jati diri. Anak-anak cenderung meniru dan belajar dari apa yang ada di lingkungan mereka. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap implementasi SRA, sebagai bagian dari komitmen nasional untuk menjamin hak, perlindungan, dan pendidikan yang berkualitas agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, bahagia, berbudi pekerti luhur, dan cinta tanah air.

Hal ini semakin memperkuat usaha untuk menanamkan pendidikan karakter di sekolah. Karena sekolah semakin mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan sekolah yang menyenangkan dan ramah anak seperti SDM yang ada di sekolah, sarana dan prasarana yang mendukung serta kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Sekolah Ramah Anak (SRA). Akan tetapi fakta di lapangan ditemukan masih adanya sekolah yang masih belum menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi

anak-anak. Masih ditemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa, masih adanya tindakan *bullying*, tindak kejahatan, merokok, tawuran serta masih ditemukannya kecurangan yang dilakukan oleh sekolah saat pelaksanaan ujian.



Gambar 1. Alur Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 15 Yogyakarta

Hal ini mengindikasikan bahwa program SRA belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyak fenomena terkait kasus kekerasan dan pemenuhan hak anak di lingkungan, khususnya lingkungan sekolah menjadi salah satu isu pendidikan, maka sepatutnya sekolah menjadi wadah atau pun pijakan untuk menciptakan dan mengembangkan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, memerlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara komprehensif. Adanya program sekolah ramah anak di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam membentuk ataupun

mendidik karakter anak di satuan pendidikan. Sekolah ramah anak menciptakan paradigma baru dalam mendidik dan mengajar siswa, menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa dan memenuhi hak serta melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam konteks ini, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan dapat dijadikan referensi pembandingan. Misalnya, penelitian oleh (Cornivia & Suwanda, 2021) dengan tema “Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak di SMP Negeri 2 Tuban”. Hasil penelitian menyatakan bahwa program sekolah berbasis ramah anak sudah diimplementasikan di SMP Negeri 2 Tuban. Implementasi program tersebut dalam tahap perencanaan meliputi melakukan rapat dengan tim meliputi tim urusan dengan bapak ibu guru, membentuk tim pelaksana sekolah ramah anak untuk memudahkan koordinasi. Pada tahap pelaksanaan meliputi melakukan kerja sama dengan pihak terkait misalnya dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, fasilitator yang faham akan sekolah ramah anak dan kerja sama antar sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan sudah terlatih hak anak dengan baik, sekolah memiliki kebijakan anti kekerasan, perbaikan sarana dan prasarana, membentuk Satgas sekolah ramah anak

yang beranggotakan siswa di SMP Negeri 2 Tuban, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat minat, menerapkan disiplin positif, menerapkan konsep BARIISAN (Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri, Nyaman).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021) dengan tema “Implementasi Sekolah Ramah Anak di MIN 9 Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 indikator yang ditetapkan MIN 9 Bandar Lampung dalam implementasi sekolah ramah anak. Indikator-indikator tersebut adalah Penataan fisik sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak dan penanaman nilai-nilai karakter. Pada penataan fisik sekolah meliputi penataan ruang kelas seperti hiasan, penempatan gambar, karya peserta didik, tempat duduk peserta didik, dan peraturan kelas, sedangkan halaman sekolah seperti petugas kebersihan, memperlindah halaman dan penjaga sekolah. Pada indikator pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih konvensi hak anak seperti sikap adil tanpa memandang status sosial peserta didik atau diskriminasi dan metode pembelajaran yang digunakan pendidik berpusat pada peserta didik.

Sementara itu, penelitian oleh (Nofrida, 2025) dengan tema “Implementasi Program Sekolah Ramah

Anak Di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 60 Kota Pekalongan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sekolah ramah anak di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 60 Kota Pekalongan adalah: (1) Pada tahap pelaksanaan meliputi melakukan kerja sama dengan pihak terkait misalnya dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, fasilitator yang faham akan sekolah ramah anak dan kerja sama antar sekolah serta kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. (2) Peran dari kepala sekolah dan hal itu sangat berpengaruh sekali untuk mewujudkan sekolah ramah anak serta peran pendidik dan tenaga kependidikan sudah terlatih hak anak dengan baik, Sekolah memiliki kebijakan anti kekerasan. (3) Pelaksanaan sekolah ramah anak telah memberikan dampak terhadap siswa meliputi perubahan karakter siswa, peningkatan prestasi siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik, adanya peningkatan keterampilan guru dalam mengajar dan kreativitas guru dalam mengajar. Serta peningkatan prestasi sekolah dengan dikenal lebih baik di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 15

Yogyakarta”. Peneliti memilih SMP Negeri 15 Yogyakarta sebagai objek penelitian di mana sekolah tersebut sudah menerapkan program sekolah ramah anak dan telah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah ramah anak. Hal ini membuat peneliti untuk menganalisis dan mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan-kebijakan program sekolah ramah anak yang diterapkan di sekolah tersebut dalam menerapkan program sekolah ramah anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan Sugiyono, secara alamiah menggunakan pendekatan naturalistik, dalam mana proses penelitian dilakukan pada kondisi lingkungan yang asli (*natural setting*) dan tanpa manipulasi variabel oleh peneliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data sering dilakukan melalui triangulasi, dan pendekatan analisis bersifat induktif dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Asep Deni dkk, 2024). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik, guna memperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 15 Yogyakarta yang terletak di Jalan Tegal Lempuyangan No. 61, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2025.

Target/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu SMP Negeri 15 Yogyakarta. Pada penelitian ini terdapat narasumber yang menjadi informan yaitu kepala sekolah, ketua bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak, 3 guru kelas, dan 3 siswa kelas 9.

Data, Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulannya data berdasarkan instrumen penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan di lapangan. Wawancara dilakukan kepada responden yaitu kepala sekolah, kepala bidang koordinator program sekolah ramah anak, 3 guru kelas, dan 3 siswa kelas 9. Studi dokumen dilakukan dengan mengambil gambar kegiatan secara langsung serta data yang diberikan oleh sekolah terkait Surat Keterangan, pembagian tugas, visi, dan misi sekolah.

Dokumentasi menjadi penguat bukti dari hasil temuan observasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana program SRA diterapkan di sekolah, dengan menggunakan kerangka analisis dari teori implementasi Edward III yang mencakup empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Pemaparan hasil penelitian disusun secara sistematis berdasarkan masing-masing aspek untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan serta tantangan dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada hak-hak anak di SMP Negeri 15 Yogyakarta.

Dalam aspek komunikasi, pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap isi program sudah cukup baik. Hal ini diperoleh melalui berbagai pelatihan seperti Konvensi Hak Anak dan workshop tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Guru menunjukkan pemahaman yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari, seperti pendekatan yang menyenangkan, penghindaran hukuman fisik, dan perlakuan yang adil terhadap siswa.

Pemahaman siswa biarpun demikian, masih beragam. Beberapa siswa memahami nilai-nilai program dari pengalaman langsung dalam kegiatan sekolah, bukan dari sosialisasi formal yang sistematis. Proses penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai forum seperti rapat kerja, briefing guru, MPLS, serta pelajaran seperti PPKn dan BK. Meskipun informasi disampaikan melalui berbagai kanal, penyampaian informasi kepada siswa belum dilakukan secara rutin dan mendalam. Sekolah memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *website* resmi, hingga poster dan *flyer* yang dipajang di

lingkungan sekolah. Penggunaan media digital ini dianggap cukup efektif menjangkau siswa, namun demikian, konten yang disampaikan masih bersifat umum dan belum maksimal dalam memberikan pemahaman mendalam. Oleh karena itu, intensitas dan kualitas komunikasi perlu ditingkatkan agar seluruh warga sekolah, terutama siswa, benar-benar memahami nilai dan tujuan program SRA secara merata.



Gambar 2. Penyampaian Informasi Program SRA oleh Kepala Sekolah kepada Guru dan Siswa dengan Media Visual

Selain itu, aspek sumber daya implementasi SRA di SMP Negeri 15 Yogyakarta didukung oleh ketersediaan fasilitas yang cukup memadai. Sekolah menyediakan ruang kelas yang layak, toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan, ruang terbuka hijau, taman bermain seperti ayunan, dan fasilitas ibadah untuk berbagai agama. Tersedia juga laboratorium,

ruang diskusi, dan sarana pendukung lain yang menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan nyaman. Namun, ditemukan ketimpangan dalam kualitas fasilitas antarkelas. Beberapa ruang kelas memiliki perabotan baru dan nyaman, sedangkan yang lain masih menggunakan kursi dan meja lama, sehingga mengurangi rasa keadilan di antara siswa.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan (Nurhayati et al., 2024) sekolah yang telah memanfaatkan sarana prasarana secara maksimal telah melaksanakan indikator kebijakan sekolah ramah anak yang sesuai. Dari segi tenaga pelaksana, guru dan staf telah menunjukkan kesiapan yang baik. Mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan dan tergabung dalam struktur tim pelaksana SRA yang jelas, mulai dari ketua, koordinator, hingga bendahara. Kolaborasi antara guru senior dengan guru muda atau guru junior juga memberikan keunggulan tersendiri dalam pengelolaan program, termasuk pengelolaan media digital. Siswa juga merasakan langsung dampak dari sikap guru yang ramah, tanggap terhadap permasalahan, dan mendukung kenyamanan belajar. Sementara itu, sumber pendanaan berasal dari Dana

BOS dan BOSDA, yang digunakan untuk kegiatan pelatihan guru, pengadaan sarana, dan berbagai kegiatan siswa. Sekolah juga terbuka terhadap dukungan sponsor dari pihak luar. Meskipun siswa belum mengetahui secara rinci tentang sistem pendanaan, mereka menyadari pentingnya keberadaan dana dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ramah anak di sekolah.



Gambar 3. Fasilitas SRA Wujudkan Sekolah Aman, Nyaman, dan Inklusif

Selanjutnya, pada aspek disposisi, terlihat adanya komitmen yang tinggi dari kepala sekolah dan para guru dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak. Hal ini selaras dengan pendapat (Hartono, 2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SRA sangat dipengaruhi oleh sikap dan kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menjadi teladan dalam membangun budaya sekolah inklusif dan berKepala sekolah secara aktif terlibat dalam perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi program, serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung perlindungan dan pengembangan karakter anak. Komitmen ini juga tampak dari keterlibatan guru yang tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator dan penghubung antara siswa, orang tua, dengan pihak sekolah. Guru mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam kegiatan seperti Jumat Karakter, kampanye anti-bullying, dan duta ramah anak. Siswa merasa memiliki ruang untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka, baik secara formal melalui OSIS dan forum kelas, maupun secara informal saat berdialog langsung dengan guru.

Keterlibatan aktif ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif bukan hanya slogan, melainkan sudah menjadi budaya sekolah yang hidup dan berkembang. Guru bahkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan kelas, seperti memilih metode pembelajaran dan bentuk penilaian, yang mencerminkan pendekatan yang menghargai suara anak. Semua ini memperkuat semangat kolaborasi

antara guru, staf, dan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar ramah dan inklusif.



Gambar 4. Siswa yang Terlibat Aktif dalam Membangun Budaya Sekolah yang Inklusif dan Partisipatif

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 15 Yogyakarta ditopang oleh kebijakan yang mendukung secara formal. Kebijakan ini bersumber dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta dan Konvensi Hak Anak, yang kemudian diinternalisasi dalam visi-misi sekolah, kurikulum, pembentukan tim pelaksana, serta pembagian tugas guru. Prinsip-prinsip ramah anak seperti tanpa hukuman fisik, anti perundungan, dan perlakuan setara terhadap semua siswa sudah diterapkan dalam praktik pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan, sekolah menerapkan pendekatan partisipatif yang melibatkan kepala sekolah, guru, staf, siswa, bahkan orang tua.

Proses musyawarah, diskusi, dan penyampaian aspirasi melalui OSIS atau forum kelas menjadi bagian integral dari mekanisme birokrasi sekolah. Siswa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif memberikan masukan. Selain itu, sistem pelaporan program dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Guru dan staf didukung dengan tim dokumentasi dan platform digital seperti drive online untuk menyimpan bukti kegiatan. Meskipun sistem pelaporan sudah baik, partisipasi orang tua dalam evaluasi program masih belum optimal dan perlu ditingkatkan agar keterlibatan mereka lebih signifikan.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang transparan, terbuka, dan responsif menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan serta keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di sekolah ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Sale et al., 2025) yang menekankan bahwa implementasi kebijakan SRA yang efektif memerlukan dukungan regulasi internal sekolah yang jelas, pembagian peran yang terstruktur, dan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Guru juga

tidak hanya menjalankan fungsi mengajar, tetapi menjadi fasilitator dan pendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Poin tersebut seperti halnya dijelaskan dalam buku pedoman oleh ((KPPPA), 2022) keberhasilan sekolah ramah anak menuntut sinergi antara kebijakan sekolah, kompetensi guru, dan partisipasi anak dalam setiap aspek kehidupan sekolah.



Gambar 5. Kebijakan Sekolah Mendukung Perlindungan dan Partisipasi Siswa dalam Program SRA

Faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 15 Yogyakarta adalah tingginya komitmen kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah berperan aktif dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, serta menggerakkan seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi. Guru juga tidak hanya menjalankan

fungsi mengajar, tetapi menjadi fasilitator dan pendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi fasilitas fisik maupun tenaga pelaksana yang telah dibekali pelatihan, turut memperkuat keberhasilan program.

Dukungan dana dari BOS, BOSDA, serta partisipasi sponsor eksternal memungkinkan sekolah mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung nilai-nilai ramah anak. Sistem komunikasi internal yang terintegrasi, melalui forum formal maupun media digital, memungkinkan penyebaran informasi program secara efektif. Partisipasi aktif guru, staf, dan siswa dalam perencanaan hingga evaluasi program menjadi penanda bahwa budaya ramah anak telah melekat kuat di lingkungan sekolah. Struktur birokrasi yang mendukung, berupa kebijakan formal dan sistem pelaporan yang terstruktur, memperkuat fondasi administratif untuk menjalankan program secara berkelanjutan.

Meskipun pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 15 Yogyakarta telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat. Salah satunya

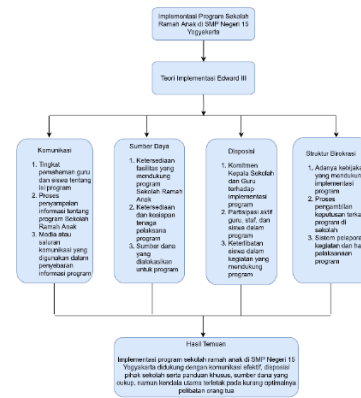
adalah kesenjangan pemahaman antar siswa. Tidak semua siswa mendapatkan informasi yang sama secara formal mengenai program ini, sehingga pemahaman mereka cenderung terbentuk dari pengalaman dan pengamatan, bukan dari sosialisasi langsung. Hal ini berisiko menimbulkan perbedaan persepsi yang dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan nilai-nilai SRA di berbagai kelas. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam kualitas fasilitas antar kelas.

Beberapa ruang kelas telah dilengkapi perabotan baru, sementara kelas lainnya masih menggunakan fasilitas lama, yang berpotensi menciptakan rasa ketidakadilan di kalangan siswa. Komunikasi yang belum rutin dan mendalam kepada siswa juga menjadi tantangan tersendiri, karena dapat menyebabkan rendahnya partisipasi aktif siswa dalam program. Terakhir, meskipun sistem pelaporan sudah berjalan baik, partisipasi orang tua dalam proses evaluasi program masih kurang optimal, sehingga masukan dari pihak luar sekolah belum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyempurnaan program. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan di aspek-aspek tersebut agar implementasi

program dapat berjalan lebih merata dan inklusif ke seluruh warga sekolah.

B. Pembahasan

Bagian pembahasan ini menguraikan secara mendalam hasil temuan penelitian mengenai implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta berdasarkan empat variabel utama dalam teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan SRA telah diimplementasikan secara efektif di lingkungan sekolah serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan analitis dan reflektif, bagian ini menghubungkan antara data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori-teori yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan program SRA. Hasil dari temuan penelitian, dideskripsikan dalam alur skema sebagai berikut:



Gambar 6. Skema Implementasi Program SRA

Dalam aspek komunikasi, implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta telah mencakup pemahaman guru dan siswa terhadap prinsip-prinsip SRA, penyampaian informasi melalui berbagai forum dan media, serta penggunaan saluran komunikasi seperti rapat kerja, MPLS, dan media sosial. Meskipun komunikasi sudah berjalan secara formal dan informal, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena pemahaman siswa masih belum merata dan kedalaman informasi belum optimal. Terjadi kesenjangan antara penyampaian formal dan pengalaman langsung siswa dalam memahami program. Oleh karena itu, strategi komunikasi partisipatif dan berkelanjutan masih perlu dikembangkan agar seluruh warga sekolah memiliki pemahaman dan keterlibatan yang seimbang (Fahmi, 2021).

Dalam aspek sumber daya, SMP Negeri 15 telah menunjukkan kesiapan dari segi sarana fisik, tenaga pelaksana, dan pendanaan. Fasilitas seperti ruang ibadah multireligius, toilet terpisah gender, dan sarana bermain telah tersedia, sementara tenaga pendidik dan staf sudah dibekali pelatihan yang relevan. Dukungan dana berasal dari BOS, BOSDA, dan sponsor. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah memenuhi kebutuhan mendasar program sesuai teori Edward III. Pendukung keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya terletak pada ketersediaan sarana fisik, tetapi juga pada pelatihan yang berkelanjutan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana dijelaskan oleh (Melinda et al., 2021) bahwa tenaga pendidik yang memahami prinsip-prinsip SRA akan lebih efektif dalam membentuk lingkungan belajar yang aman dan menghargai hak anak. Namun, meskipun sumber daya mencukupi, masih terdapat kesenjangan kecil seperti belum meratanya pemanfaatan fasilitas dan pemahaman siswa terhadap tujuan program yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Untuk aspek disposisi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksana program, terutama kepala sekolah dan guru, menunjukkan sikap

dan komitmen tinggi terhadap SRA. Mereka secara aktif terlibat dalam menyosialisasikan nilai-nilai ramah anak melalui pelatihan dan pembelajaran sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori Edward yang menekankan pentingnya sikap pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Guru dan kepala sekolah di SMP Negeri 15 tidak hanya memahami program secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilainya dalam keseharian. Namun demikian, variasi pemahaman di kalangan siswa menunjukkan bahwa perlu adanya konsistensi lebih lanjut agar nilai-nilai program benar-benar tersampaikan dan dihayati oleh seluruh warga sekolah.

Pada aspek struktur birokrasi, SMP Negeri 15 telah menerapkan struktur yang partisipatif, fleksibel, dan mendukung prinsip inklusi. Proses pengambilan keputusan melibatkan guru, siswa, dan stakeholder lain dalam forum-forum seperti OSIS, musyawarah kelas, dan rapat evaluasi. SOP yang digunakan bersifat adaptif dan tidak kaku, serta pelaporan kegiatan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Model birokrasi yang diterapkan telah sesuai dengan anjuran Edward agar struktur organisasi bersifat responsif dan efisien, bukan hierarkis dan kaku. Hal ini

menunjukkan bahwa struktur birokrasi sekolah sudah cukup matang dalam mendukung implementasi kebijakan ramah anak secara efektif dan kolaboratif. Model ini juga mencerminkan prinsip yang dianjurkan dalam buku Pedoman Sekolah Ramah Anak oleh KPPPA (2022), yaitu pembentukan sistem sekolah yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 15 Yogyakarta telah berjalan dengan baik berdasarkan empat aspek menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, pihak sekolah telah berupaya menyampaikan informasi tentang program melalui berbagai media dan forum, meskipun masih perlu peningkatan konsistensi dan kedalaman informasi kepada siswa. Dalam hal sumber daya, fasilitas sekolah sudah cukup mendukung pelaksanaan program, tenaga pelaksana telah dibekali pelatihan, dan pendanaan program berasal dari BOS dan BOSDA yang dimanfaatkan secara optimal.

Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen kuat dari kepala sekolah,

guru, serta partisipasi aktif siswa dalam kegiatan yang mendukung program. Sementara dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program didukung oleh kebijakan formal, proses pengambilan keputusan yang partisipatif, dan sistem pelaporan yang terstruktur. Secara keseluruhan, SMP Negeri 15 Yogyakarta telah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak. Faktor pendukung utama dari implementasi Program SRA di SMP Negeri 15 Yogyakarta antara lain adalah komitmen kuat dari kepala sekolah dan guru, adanya pelatihan berkelanjutan, fasilitas yang inklusif, serta sistem pengambilan keputusan yang partisipatif.

Kesiapan tenaga pelaksana yang ditunjang oleh pelatihan Konvensi Hak Anak dan struktur organisasi tim SRA juga memperkuat keberhasilan program. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketimpangan dalam pemahaman siswa terhadap program, kurangnya intensitas penyampaian informasi, ketidakseimbangan kualitas fasilitas antar kelas, serta kurang optimalnya pelibatan orang tua dalam evaluasi program. Selain itu, konten media digital yang digunakan untuk sosialisasi dinilai masih bersifat umum dan belum cukup mendalam dalam menjangkau seluruh siswa.

Saran

Berdasarkan penelitian tentang “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 15 Yogyakarta”, terdapat 4 (empat) saran yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pertama, memperkuat sosialisasi Program Sekolah Ramah Anak, sosialisasi perlu ditingkatkan secara intensif dan mendalam, khususnya kepada peserta didik yang belum sepenuhnya memahami efisiensi program. Kedua, melakukan pemerataan dan pemeliharaan sarana prasarana, sekolah disarankan untuk melakukan pemerataan dan pemeliharaan fasilitas secara terbuka berkala guna menjamin kenyamanan belajar bagi seluruh siswa.

Ketiga, meningkatkan kapasitas tenaga pelaksana, peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara konsisten. Keempat, meningkatkan pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, partisipasi siswa perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mencerminkan rasa memiliki terhadap budaya sekolah yang inklusif. Dengan demikian, berbagai bentuk saran atau rekomendasi dapat terarah secara tepat sasaran, komprehensif, dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- (KPPPA), K. P. P. dan P. A. (2022). *Pedoman Sekolah Ramah Anak*.
- Asep Deni dkk. (2024). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>
- Azizah, A. N., Nuria Fitriawan, B. K., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2024). Implementasi Sekolah Ramah Anak Untuk Mewujudkan Perilaku Antikekerasan. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 16*(2), 131–144. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v16i2.801>
- Cornivia, S. P., & Suwanda, I. M. (2021). Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak Di Smp Negeri 2 Tuban. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 10*(3), 617–632. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p617-632>
- Fahmi, A. (2021). *Implementasi program sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran*.
- Hartono, R. (2023). *Pendidikan Inklusif dan Sekolah Ramah Anak*.
- Melinda, Putri, L., Warlizasusi, Jumira,

- Khair, & Ummul. (2021). *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Membentuk Budaya Sekolah di MIS GUPPI 12 Lubuk Kembang*. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1760>
- Nofrida, E. (2025). *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 60 Kota Pekalongan*.
- Nurhayati, R., Hajaroh, M., Purwastuti, L. A., & Rohman, A. (2024). Asesmen kebijakan sekolah ramah anak di sekolah dasar. *Humanika*, 24(1), 57–66. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68600>
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK DI MIN 9 BANDAR LAMPUNG. *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 15(01), 133–158.
- Sale, L. O. A. R., Karsadi, & Yusuf, M. (2025). Implementasi, Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di SMP Negeri 14 Kendari. *Jurnal Wahana Kajian Pendidikan IPS*, 9(1), 44–55. <https://doi.org/10.33772/JWKP-IPS>
- Setiadi, N., Purwanti, P., Widiatmoko, A., & Agung Yuwono Putro, A. (2023). Peran Guru Kelas dan Orangtua pada Sekolah Ramah Anak untuk Mencegah dan Mengatasi Perundungan. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 7(01), 16–26. <https://doi.org/10.30738/tc.v7i01.13971>
- Siregar. (2022). Implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam pembentukan karakter disiplin di SD Bina Anak Shaleh Pasuruan. *γ787, 8.5.2017*, 2003–2005.
- Sukmawati, R., & Tarmizi, M. I. (2022). Mplementasi Sekolah Ramah Anak Sebagai Pilar Pendidikan Karakter Holistik Bagi Peserta Didik. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Syafi'i, I., & Rosyidah, L. (2022). Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Sekolah Inklusif. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 13(2), 67. <https://doi.org/10.58836/jpma.v13i2.12386>